



RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2023

Dinas Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kepulauan Selayar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan Ridho-Nya Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Selayar telah dapat diselesaikan. Rencana Kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja yang telah disusun ini tidak berarti banyak tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran SKPD. Masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar lebih baik dimasa akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini diucapkan terima kasih.

Benteng, Agustus 2023

KEPALA DINAS



ANDI ABDURRAHMAN, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670526 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	5
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II..5	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	29
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD	34
BAB IV. PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	6
Tabel 2.2	27
Tabel 3.1	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja Perubahan SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dokumen Renja Perubahan SKPD merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja Perubahan ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perubahan SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan Renja Perubahan Tahun 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 Pasal 361 ayat 3, Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari pendahuluan, evaluasi renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah serta penutup. Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja Perubahan SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD

pada tahun anggaran berjalan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Renja Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 adalah :

- a. Sebagai input dalam rangka perbaikan rencana kerja yang telah disusun satu tahun sebelumnya terhadap pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan yang telah berjalan dan proyeksi selanjutnya untuk satu tahun kedepan;
- b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan diwilayah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. Membuat acuan perubahan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis. Kebijakan, Program dan kegiatan Pembangunan sesuai atau tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (2023)

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

- a. Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut : Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II

Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13-9+10+11+12		14-7+13		15-14/6x100			
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan, produktivitas dan daya saing serta kemandirian pelaku usaha			Persentase kemandirian Koperasi dan BPR/LKM Mandiri	25,36 %	8.962.027.221	18,84 %	4.793.806.900	21,01 %	2.326.380.000																
				Persentase Kemandirian UMK	7,50 %		3,50 %		4,50 %																	
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi sehat	100,00 %	263.000.000	0,00 %	0	100,00 %	25.000.000																
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang diperiksa dan diawasi	3,00Unit Usaha	263.000.000	0,00	0	3,00Unit Usaha	25.000.000	0,00%	0	0,00%	0					0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja (Unit Usaha)	150	263.000.000	0	0	30	25.000.000	0	0	0	0					0	0	0	0	0,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Belum Tercapai

		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan	100,00 %	1.148.040.231	0,00 %	163.640.000	100,00 %	180.640.000																
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Pelatihan Perkerpasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	60,00Unit Usaha	885.040.231	2,20	163.640.000	60,00Unit Usaha	155.640.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	2,20%	163.640.000	3,67%	18,49%		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIAN, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
		2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkerpasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkerpasian (Orang)	500	885.040.231	11	163.640.000	60	155.640.000	0	0	0	0	0	0	11	163.640.000	2,20%	18,49%		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIAN, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Belum Tercapai			
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan	100,00 %	2.539.040.231	0,00 %	600.877.200	100,00 %	795.370.000																
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang naik kelas	30,00Unit Usaha	1.391.000.000	28,33	437.237.200	30,00Unit Usaha	614.730.000	0,00%	1.874.996	16,67%	31.500.000				16,67%	33.374.996	31,67%	470.612.196	105,56%	33,83%		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIAN, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	150	767.000.000	75	202.677.200	30	350.000.000	0	1.874.996	0	0				0	1.874.996	75	204.552.196	50,00%	26,67%		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIAN, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Belum Tercapai

		2.17.07.2.0 1.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	15	624.000.000	1	234.560.000	3	264.730.000	0	0	1	31.500.000					1	31.500.000	2	266.060.000	13,33%	42,64%	DINAS PERDAG ANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENG AH	Belum Tercapai	
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGA N UMKM	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya	100,00 %	5.011.946.759	0,00 %	4.029.289.700	100,00 %	1.325.370.000																	
		2.17.08.2.0 1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang Naik kelas dari Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil melalui Pusat layanan usaha Terpadu (PLUT)	30,00 Uni t Usaha	2.472.906.528	12,70	3.428.412.500	30,00 Uni t Usaha	530.000.000	0,00%	0	0,00%	8.370.000					0,00%	8.370.000	12,70%	3.436.782.500	42,34%	138,98 %	DINAS PERDAG ANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENG AH		
		2.17.08.2.0 1.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	370	2.472.906.528	47	3.428.412.500	37	530.000.000	0	0	0	8.370.000					0	8.370.000	47	3.436.782.500	12,70%	138,98 %	DINAS PERDAG ANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENG AH	Belum Tercapai	
2	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah			Nilai SAKIP perangkat daerah	80 (A) Predikat	14.579.371.563	65 (B) Predikat	4.746.727.034	70 (BB) Predikat	5.065.582.296																	
				Laporan keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai Status		Sesuai Status		Sesuai Status																		
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	88 (B) Predikat		80 (B) Predikat		82 (B) Predikat																		

		3.30.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3	39.000.000	1	7.282.000	1	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1	7.282.000	33,33%	18,67%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Belum Tercapai
		3.30.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	105.000.000	3	8.393.000	4	10.000.000	0	0	4	7.399.000		4	7.399.000	7	15.792.000	58,33%	15,04%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Tercapai
		3.30.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	39	139.000.000	13	7.711.000	13	12.000.000	3	0	0	1.170.000		3	1.170.000	16	8.881.000	41,03%	6,39%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Belum Tercapai
		3.30.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00%	9.781.728.521	26,98	2.822.333.888	100,00 %	2.958.394.296	0,00%	570.353.822	0,00%	786.888.297		0,00%	1.357.242.119	26,98%	4.179.576.007	26,98%	42,73%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		3.30.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	117	9.655.228.521	32	2.807.333.888	39	2.943.394.296	0	570.353.822	0	786.888.297		0	1.357.242.119	32	4.164.576.007	27,35%	43,13%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Belum Tercapai

		3.30.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3	53.500.000	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000	33,33%	9,35%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Belum Tercapai
		3.30.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	36	39.000.000	5	5.000.000	12	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5	5.000.000	13,89%	12,82%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Belum Tercapai	
		3.30.01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis/Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	36	34.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	0	0	0	0	0	0	12	5.000.000	33,33%	14,71%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Belum Tercapai	
		3.30.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi BMD yang tersusun	100,00%	39.000.000	0,00	10.000.000	100,00 %	10.000.000	0,00%	2.050.000	0,00%	0	0,00%	2.050.000	0,00%	12.050.000	0,00%	30,90%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		

		3.30.01.2.0 3.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	39.000.000	0	0	4	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Belum Tercapai
		3.30.01.2.0 3.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	1	10.000.000	1	5.000.000	0	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000	1	12.050.000	0,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Belum Tercapai	
		3.30.01.2.0 4	Administrasi Pendapatan Daerah Kevenangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Pendapatan daerah yang tersusun	100,00%	0	0,00	0	100,00 %	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
		3.30.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	84.914.383	16,67	5.000.000	100,00 %	20.000.000	12,50%	0	50,00%	7.010.000	62,50%	7.010.000	37,50%	12.010.000	37,50%	14,14%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
		3.30.01.2.0 5.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	54.914.383	4	5.000.000	4	10.000.000	1	0	2	3.220.000	3	3.220.000	7	8.220.000	58,33%	14,97%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Belum Tercapai		

		3.30.01.2.0 5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	6	30.000.000	0	0	2	10.000.000	0	0	1	3.790.000						1	3.790.000	1	3.790.000	16,67%	12,63%	DINAS PERDAG ANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENG AH	Belum Tercapai
		3.30.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran	100,00%	1.981.400.000	30,57	821.109.200	100,00 %	624.943.800	43,28%	308.678.17 7	48,04%	273.038.93 0						91,32%	581.717.10 7	58,63%	1.402.826.307	58,63%	70,80%	DINAS PERDAG ANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENG AH	
		3.30.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	210	626.000.000	70	266.960.000	70	161.686.000	30	72.936.000	40	88.750.000						70	161.686.00 0	140	428.646.000	66,67%	68,47%	DINAS PERDAG ANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENG AH	Tercapai
		3.30.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	271	217.000.000	70	133.372.200	70	92.518.800	30	37.373.800	30	49.248.800						60	86.622.600	130	219.994.800	47,97%	101,38 %	DINAS PERDAG ANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENG AH	Belum Tercapai

		3.30.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	836	1.138.400.000	272	420.777.000	272	370.739.000	120	198.368.37 7	120	135.040.13 0					240	333.408.50 7	512	754.185.507	61,24%	66,25%	DINAS PERDAG ANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENG AH	Belum Tercapai
		3.30.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Peminjaman Pemerintah Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100,00%	86.000.000	33,33	214.974.000	100,00 %	368.828.000	0,00%	0	100,00 %	352.830.00 0					100,00%	352.830.00 0	66,67%	567.804.000	66,67%	60,24 %	DINAS PERDAG ANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENG AH	
		3.30.01.2.0 7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	86.000.000	1	214.974.000	1	368.828.000	0	0	1	352.830.00 0					1	352.830.00 0	2	567.804.000	66,67%	60,24 %	DINAS PERDAG ANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENG AH	Tercapai
		3.30.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Peminjaman Pemerintah Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran	100,00%	1.622.600.000	33,33	638.552.946	100,00 %	548.846.200	26,11%	113.297.19 7	28,80%	132.927.10 0					54,91%	246.224.29 7	51,64%	884.777.243	51,64%	54,53%	DINAS PERDAG ANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENG AH	
		3.30.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	300	33.500.000	100	5.330.000	100	15.000.000	20	0	30	6.760.000					50	6.760.000	150	12.090.000	50,00%	36,09%	DINAS PERDAG ANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENG AH	Belum Tercapai

		3.30.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	9	269.100.000	3	161.502.546	3	110.155.000	1	57.385.597	1	36.967.100					2	94.352.697	5	255.855.243	55,6%	95,08%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Belum Tercapai
		3.30.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	156	1.320.000.000	52	471.720.400	52	423.691.200	13	55.911.600	12	89.200.000					25	145.111.600	77	616.832.000	49,36%	46,73%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Belum Tercapai
		3.30.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemondok Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran administrasi barang milik daerah	100,00%	437.728.659	16,67	186.555.000	100,00 %	484.570.000	7,50%	52.785.001	72,50%	54.084.000					80,00%	106.869.001	35,00%	293.424.001	35,00%	67,03%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		3.30.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibuyarkan Pajaknya (Unit)	3	206.330.000	0	0	1	107.910.000	0	42.885.001	1	27.061.000					1	69.946.001	1	69.946.001	33,33%	33,90%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Tercapai
		3.30.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	67.514.000	10	24.010.000	10	51.530.000	3	3.400.000	4	11.050.000					7	14.450.000	17	38.460.000	56,67%	56,97%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Belum Tercapai

		3.30.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	163.884.659	2	81.700.000	2	100.130.000	0	6.500.000	1	0					1	6.500.000	3	88.200.000	50,00%	53,82%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Belum Tercapai		
		3.30.01.2.0 9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	1	80.845.000	1	225.000.000	0	0	1	15.973.000					1	15.973.000	2	96.818.000	0,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Tercapai		
3	Meningkatnya potensi ketersediaan fasilitas perdagangan dan penguatan pengawasan perdagangan.			Presentase Fasilitas Perdagangan yang memenuhi standar	81,25 %	3.580.427.375	56,25 %	556.373.400	62,5 %	1.750.000.000																		
				Persentase terkendalinya harga komoditas perdagangan	18 %		18 %	18 %																				
				Kecukupan Komoditas Perdagangan	100 %		100 %	100 %																				
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase jenis komoditi yang dipantau	100,00 %	858.678.697	0,00 %	221.404.000	100,00 %	850.000.000																		
		3.30.04.2.0 2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dikendalikan	1,00Lokasi	858.678.697	20,00	221.404.000	1,00Lokasi	850.000.000	0,00%	57.400.000	0,00%	419.819.000					0,00%	477.219.000	20,00%	698.623.000	2,000,00%	81,36%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			

		3.30.04.2.0 2.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	5	600.828.197	1	101.534.000	1	50.000.000	0	8.400.000	0	2.160.000					0	10.560.000	1	112.094.000	20,00%	18,66%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Belum Tercapai	
		3.30.04.2.0 2.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	5	257.850.500	1	119.870.000	1	800.000.000	0	49.000.000	0	417.659.000					0	466.659.000	1	586.529.000	20,00%	227,47 %	DINAS PERDAGANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Belum Tercapai	
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur yang ditera	100,00 %	2.721.748.678	0,00 %	334.969.400	100,00 %	900.000.000																	
		3.30.06.2.0 1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat ukur yang ditera (%)	10,00%	1.863.069.981	10,00	113.565.400	10,00%	50.000.000	19,75%	1.690.000	15,74%	22.193.900					35,49%	23.883.900	17,10%	137.449.300	170,98%	7,38%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
		3.30.06.2.0 1.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.250	830.069.981	0	24.620.400	650	25.000.000	192	1.310.000	33	17.178.900					225	18.488.900	225	43.109.300	6,92%	5,19%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERAS I, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Belum Tercapai	

		3.30.06.2.0 1.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	1.155	1.033.000.000	231	88.945.000	231	25.000.000	23	380.000	61	5.015.000				84	5.395.000	315	94.340.000	27,27%	9,13%	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Belum Tercapai	
Total Target (RP)									7.290.952.296		Total Realisasi (RP)						3.211.468.420									
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		43,17	44,05					
																		Predikat kinerja		SR	SR					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																										

Berdasarkan hasil tabel 2.1 rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 berupa :

- Sub kegiatan yang telah memenuhi target/telah dilaksanakan;
 - Untuk sub kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023 terdapat sub kegiatan yang telah memenuhi target antara lain:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 66,67%
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 66,67%
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 66,67%
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 58,33%
 - e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 66,67%
 - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 66,67%
 - g. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0,00%
- Sub kegiatan yang tidak memenuhi target karena belum dilaksanakan;
 - Untuk sub kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023 terdapat sub kegiatan yang tidak memenuhi target antara lain:
 - a. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0,00%
 - b. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 2,20%
 - c. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro sampai dengan

- triwulan II telah terealisasi sebesar 50%
- d. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 13,33%
 - e. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 12,70%
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 33,33%
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 33,33%
 - h. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 41,03%
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 27,35%
 - j. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 33,33%
 - k. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 13,89%
 - l. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 33,33%
 - m. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0,00%
 - n. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0,00%
 - o. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 58,33%
 - p. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 16,67%
 - q. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 47,97%
 - r. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 61,24%
 - s. Penyediaan Jasa Surat Menyurat sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 50%
 - t. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik sampai

dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 55,56%

- u. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 49,36%
 - v. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 56,67%
 - w. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0,00%
 - x. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 20,00%
 - y. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 20,00%
 - z. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 6,92%
 - aa. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 27,27%
- Sub kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun berjalan
- Untuk sub kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023 tidak terdapat sub kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Sedangkan untuk kinerja anggaran tahun 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Evaluasi Kinerja Anggaran
Tahun 2023**

NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI s/d TRIWULAN II TA 2023	
		Rp	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.065.582.296	2.668.620.523	52,69
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	25.000.000	0	0

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	183.761.200	0	0
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	614.730.000	33.374.996	5,43
Program Pengembangan UMKM	530.000.000	8.370.000	1,58
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	850.000.000	477.219.000	56,14
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	50.000.000	23.883.900	47,77

Tahun 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan 7 Program dan 14 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 6.920.952.296 dengan rincian:

- Belanja Operasi : Rp. 6.552.124.296
- Belanja Modal : Rp. 368.828.000

Adapun realisasi anggaran belanja langsung tahun 2023 Semester 1 per sub kegiatan adalah sebagai berikut :

**Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Tahun 2023 (s/d 30 Juni 2023)**

PROGRAM/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.065.582.296	2.668.619.923	52,69
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000	880.000	12,57
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	5.000.000	2.680.000	53,6
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	5.000.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	2.549.000	50,98
Koordinasi dan Penyusunan	6.000.000	0	

Perubahan DPA-SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	7.399.000	73,99
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	1.170.000	9,75
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.943.394.296	1.357.242.119	46,11
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.000.000	0	0
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	0	0
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	0	0
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	2.050.000	41
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	3.220.000	32,2
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	3.790.000	37,9
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.686.000	161.686.000	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92.518.800	86.622.000	93,63
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.739.000	333.408.507	89,93
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	368.828.000	352.830.000	95,66

Lainnya yang Disediakan			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	6.760.000	45,07
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.155.000	94.352.697	85,65
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	423.691.200	145.111.600	34,25
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.910.000	69.946.000	64,82
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.530.000	14.450.000	28,04
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.130.000	6.500.000	6,49
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	225.000.000	15.973.000	7,1
Jumlah	5.065.582.296	2.668.619.923	52,69
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	25.000.000	0	0
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	0	0
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	155.640.000	0	0
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	155.640.000	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA	614.730.000	33.374.996	5,43

<i>KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</i>			
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	350.000.000	1.874.996	0,54
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	264.730.000	31.500.000	11,9
<i>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</i>	530.000.000	8.370.000	1,58
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	530.000.000	8.370.000	1,58
Jumlah	1.325.370.000	41.744.996	3,15
<i>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</i>	850.000.000	477.219.000	56,14
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	50.000.000	10.560.000	21,12
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	800.000.000	466.659.000	93,33
<i>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</i>	50.000.000	23.883.900	47,77
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	25.000.000	18.488.900	73,96
Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	25.000.000	5.395.000	21,58
Jumlah	900.000.000	501.102.900	55,68

Dari hasil capaian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa sub kegiatan yang telah tercapai dari target yang telah ditetapkan. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai lembaga memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dijelaskan berdasarkan pencapaian IKU berdasarkan Renstra yang disajikan ke dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun Berjalan sampai triwulan II

NO.	Indikator	SPM	IKK	Target Kinerja Capaian Renstra	Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun Berjalan	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik			100%	100%	
2	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan			100%	123,2%	
3	Persentase UTTP yang bertanda tera sah			100%	0%	
4	Persentase koperasi aktif			100%	99,27%	
5	Persentase koperasi sehat			100%	18,37%	
6	Persentase peningkatan UMKM yang produktif			100%	100%	
7	Persentase peningkatan sentra UKM Potensial yang Dikembangkan			100%	66,66%	
12			Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	7,84%	7,88%	
13			Persentase Izin Usaha Sektor Perdagangan yang diterbitkan	100%	100%	
14			Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	100%	100%	
15			Persentase jenis komoditi yang dipantau	100%	20,58%	
16			Persentase alat ukur yang ditera	100%	0%	
17			Persentase produk lokal yang dipasarkan	100%	30%	
18			Persentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	100%	18,23%	
19			Persentase koperasi sehat	100%	18,37%	
20			Persentase koperasi KSP/USP yang sehat	100%	11,1%	
21			Persentase pengurus koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan	100%	24,15%	
22			Persentase koperasi yang diberdayakan dan mendapatkan perlindungan	100%	100%	
23			Persentase UMKM yang diberdayakan	100%	54,62%	
24			Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	45,67%	

Adapun penyebab belum tercapainya target IKU dapat dilihat dari beberapa faktor dibawah ini:

- a. Belum optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya disebabkan karena sampai saat ini belum ada sarana dan prasarana transportasi yang khusus mengangkat logistik dan komoditi hasil pertanian dan perikanan.
- b. Belum adanya hasil komoditi asal Selayar yang berkategori ekspor yang dikirim ke Makassar ataupun ke Surabaya disebabkan belum adanya pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) barang yang merupakan persyaratan untuk dapat memasuki wilayah negara tujuan, dan SKA juga merupakan persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk yang diberikan oleh negara tujuan. SKA diterbitkan oleh Menteri Perdagangan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengeluarkan SKA atas barang ekspor di Indonesia.
- c. Belum optimalnya hasil pertanian dan perkebunan untuk kebutuhan pokok seperti sayur-sayuran, buah-buahan, beras dan lainnya yang menyebabkan para pedagang masih memasok dari daerah lain untuk diperjual belikan di pasar.
- d. Masih tingginya penggunaan barang impor yang relatif lebih terjangkau harganya padahal yang diharapkan sebaliknya. Penyebab utama kondisi ini adalah daya saing produk-produk dalam daerah yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya.
- e. Banyaknya koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat, karena kurang dikuasainya manajemen koperasi oleh pengurus maupun anggota.
- f. Masih banyak koperasi yang memerlukan bantuan fasilitas dalam mengembangkan usahanya.
- g. Terbatasnya tenaga terampil.
- h. Kurangnya inovasi produk dalam hal meningkatkan daya saing bisnis. Para pengusaha seringkali di hadapkan pada kendala ketika melakukan inovasi produksinya.
- i. Kesulitan dalam mendistribusikan produk karena selama ini kebanyakan pelaku UKM kekurangan pangsa pasar dalam hal mendistribusikan produknya dan belum

memanfaatkan/mengoptimalkan pemasaran online.

- j. Belum optimalnya penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) oleh pelaku usaha.
- k. Adanya kesalahan penyataran jabatan pengawas kedalam jabatan fungsional penera sehingga pada Tahun 2022 tidak tersedia tenaga fungsional penera yang menjadi persyaratan penerbitan tanda tera sah.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk mencapai target IKU, antara lain:

1. Melakukan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kepada koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat.
2. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola UKM secara swadaya.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, meminimalisir ketidakpastian, dan memproses pembelian harus mudah dan cepat.
4. Melakukan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pasar tradisional dalam membantu meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha maupun peningkatan PAD.
5. Pembaharuan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) melalui kalibrasi secara berkala dan pengadaan alat yang baru.
6. Segera mengusulkan pengangkatan pejabat fungsional penera yang akan menangani program kegiatan kemetrologian sehingga tanda tera sah dapat diterbitkan.
7. Kegiatan Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
8. Kegiatan Peningkatan Akses kepada Sumber daya Produktif dalam rangka Pemulihan Ekonomi dengan tujuan Mewujudkan kemandirian koperasi dan UKM sebagai pelaku strategis dalam perekonomian.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Peran dan posisi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dengan Pemerintah Daerah dalam Lingkup Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu ditingkatkan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan,

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibutuhkan sumber daya manusia yang semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat.

Selain itu dukungan dana yang proporsional dan memadai sangat dibutuhkan untuk optimalisasi dan peningkatan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Kepastian regulasi dan aspek hukum baik dalam ranah kebijakan maupun operasional teknis juga sangat diperlukan agar pelaksanaan kinerja tidak terkendala. Pada ranah kebijakan, perumusan integrasi pembinaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan inovasi upaya strategis mewujudkan tupoksi dengan lebih terukur dan sinergis.

Kebijakan ini diharapkan mampu mengakselerasi upaya pencapaian visi misi kepala daerah sesuai dengan tupoksi Pemerintah Daerah. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak permasalahan dan hambatan lain yang akan dihadapi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar. Perlu digaris bawahi pula berkaitan dengan kondisi riil pelaku usaha bahwa kualitas SDM pelaku usaha bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah masih terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan, dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi, dan pemasaran pun masih lemah.

Dengan melihat kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan yang masih lemah dalam menghadapi tantangan khususnya dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati 2021-2026 antara lain:

1. Perlunya peningkatan kualitas sentra kerajinan dengan cara memanfaatkan sarana dan prasarana pusat layanan usaha terpadu (PLUT)
2. Masih terbatasnya ketersediaan SDM Kompetensi

Beberapa isu penting yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai pada akhir

Pembangunan Jangka Menengah (PJM) yaitu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut

1. Pengembangan ekonomi lokal dengan optimalisasi segenap potensi;
2. Pengembangan UKM dengan optimalisasi pemberdayaan sentra UKM dan produk unggulan daerah;
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha UMKM dan, perdagangan;
4. Peningkatan penggunaan produk daerah untuk mendorong pengembangan UMKM lokal;
5. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan mendorong peningkatan kualitas dan perluasan pasar;
6. Peningkatan perlindungan konsumen dan peningkatan kemetrolgian daerah;
7. Peningkatan koordinasi dan sinergisitas program/kegiatan dan pendanaan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
8. Peningkatan inovasi daerah serta integrasi pembinaan perdagangan, koperasi dan UMKM;
9. Optimalisasi pendapatan dengan upaya intensifikasi pendapatan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun mendatang.

Setelah direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, ditentukan isu-isu strategis :

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Koperasi dan UKM

1. Peningkatan pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kepada Koperasi yang kondisinya sudah tidak sehat. Peningkatan anggaran pembinaan baik ke APBD Provinsi maupun APBN dengan mengefektifkan penggunaan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan dengan mengupayakan modal Anggaran untuk Pengembangan Tehnologi Informasi (TI), SDM dan Adanya Aplikasi TI yang sesuai dengan kebutuhan budaya/ Karakteristik UMKM sehingga informasi yang menunjang kegiatan usaha baik berupa informasi pasar maupun informasi mengenai desain kemasan untuk produk /jasa dapat terpenuhi.
2. Peningkatan akses pelaku usaha Koperasi dan UMKM terhadap layanan perbankan dengan mengupayakan mengembangkan usaha para pelaku KMKM dengan memberikan Kewirausahaan kepada pelaku melalui bantuan teknis mulai dari produksi, pembukuan keuangan hingga pemasaran serta mendorong UMKM untuk menggunakan layanan digital atau digitalisasi
3. Peningkatan Pencapaian koperasi yang sehat jika koperasi mempunyai kemampuan finansial, management dan mampu memberikan fasilitas permodalan serta UMKM berbasis Kreativitas yang sesuai dukungan pemerintah melalui PP No. 6 thn 2006 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Dengan menyiapkan Tenaga Kerja terampil dan berkualitas diantaranya Akuntan yang ahli dibidangnya, kerjasama antara pendidikan akademik untuk mencapai standar dan kompetisi yang di butuhkan.
4. Peningkatan strategi pemetaan product, Price,Place,Promotion dalam bisnis UMKM sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh semua konsumen atau selera pasar
5. Peningkatan jaringan distribusi barang dan jasa melalui kapal muat container selayar ke surabaya dan ke kota lainnya mempunyai potensi yang cukup besar dalam mendukung visi bupati sebagai bandar maritim
6. Pembentukan kebijakan yang bisa dilakukan untuk mempercepat UMKM naik kelas yaitu adanya Perizinan sehingga UMKM mampu merambah pasarnya ke skala nsional bahkan ekspor

Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Perdagangan

1. Percepatan pengembangan kawasan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Peningkatan di aspek inovasi dan diversifikasi produk agar mendorong UKM yang tidak kalah bersaing dan berkembang dengan inovasi produk yang baru dan sesuai dengan selera pasar
3. Peningkatan kontribusi perdagangan terhadap PDRB.
4. Perlindungan konsumen dalam upaya ketetapan UTP.
5. Perluasan jaringan pemasaran dengan memanfaatkan jaringan distribusi logistik yang berpotensi cukup besar dalam mendukung visi bupati sebagai bandar maritim.
6. Peningkatan produk-produk unggulan yang dipromosikan dengan mengutamakan komoditi ekspor agar investor dapat membuka peluang lapangan usaha bagi masyarakat,
7. Sigernitas pemerintah pusat dan daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan nyata sehingga kegiatan strategi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Berikut ini program dan kegiatan indikatif Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun 2023:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
 - 1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

3. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
 - 1) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
 - 1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
 - 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
 - 1) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
7. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
 - 1) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
8. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAPATAN PERUSAHAAN
 - 1) Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
9. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
 - 1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
10. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
 - 1) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
11. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah
12. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
 - 1) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

13. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

1) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dari kegiatan dibagi kedalam beberapa sub kegiatan. Sub kegiatan ini menjadi indikator kinerja dalam pelaksanaan kegiatan. Sub kegiatan dibuat menyesuaikan dari kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan dapat berlangsung sesuai tujuan yang sudah dibuat.

Untuk lebih jelasnya, Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan diuraikan dalam Rekapitulasi Perubahan Renja dan Pendanaan OPD pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi	Target 2023		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif			
				Semula	Menjadi	Renja 2023	Renja 2023 Perubahan							
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						1.000.370.000	1.425.370.000		2.148.552.445		
2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi sehat	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	13,15 Persen	13,15 Persen	25.000.000	25.000.000		98.687.519		
2	17	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	2,92 Persen	2,92 Persen	25.000.000	25.000.000		98.687.519		
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	88 Koperasi	88 Koperasi	25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	13.15 Persen	26.000.000
2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi KSP/USP yang sehat	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	12,15 Persen	12,15 Persen	0	0			129.882.833	
2	17	04	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan, perindustrian dan KUKM	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	13,5 Persen	13,5 Persen	0	0			129.882.833	

2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	88 Koperasi	88 Koperasi	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12.15 Persen	37.000.000
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Koperasi Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	10 Koperasi	10 Koperasi	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12.15 Persen	92.882.833
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	11,51 Persen	11,51 Persen	183.761.200	155.640.000			189.560.030
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	2,92 Persen	2,92 Persen	183.761.200	155.640.000			189.560.030
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	60 Orang	60 Orang	183.761.200	155.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11,51 Persen	189.560.030
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberdayakan dan mendapatkan perlindungan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	85,5 Persen	85,5 Persen	0	100.000.000			192.226.592
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan, perindustrian dan KUKM	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	13,5 Persen	13,5 Persen	0	100.000.000			192.226.592

2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Kali	1 Kali	0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85,5 Persen	192.226.592
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	22,7 Persen	22,7 Persen	261.608.800	614.730.000				
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan, perindustrian dan KUKM	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	13,5 Persen	13,5 Persen	261.608.800	614.730.000				
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	15000 Pelaku Usaha	15000 Pelaku Usaha	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22,7 Persen	101.187.296
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	6 Kali	6 Kali	25.000.000	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22,7 Persen	351.000.000

2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	25 Dokumen	25 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22,7 Persen	83.000.000
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Meningkatkan Kegiatan Pelaku Usaha mikro	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	51 Pelaku Usaha	0 Unit Usaha 51 Pelaku Usaha	236.608.800	264.730.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22,7 Persen	264.730.000
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	10 Orang	10 Orang	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22,7 Persen	152.000.000
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	22,88 Persen	22,88 Persen	530.000.000	530.000.000			
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan, perindustrian dan KUKM	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	13,5 Persen	13,5 Persen	530.000.000	530.000.000			
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah peralatan yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	37 Unit Usaha	37 Unit Usaha	530.000.000	530.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22,88 Persen	529.653.025

3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					301.660.000	1.050.200.000			1.751.973.892	
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja (%)	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	70,28 Persen	70,28 Persen	151.660.000	150.200.000			70.814.365	
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	66,15 Persen	66,15 Persen	151.660.000	150.200.000			70.814.365	
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan/Perlengkapan /Mesin yang terpelihara	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	0 Unit 32 Unit	0 Unit 32 Unit	51.530.000	50.070.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70,28 Persen	20.514.000
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Unit 0 Unit	1 Unit 0 Unit	100.130.000	100.130.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70,28 Persen	50.300.365
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Sektor Perdagangan yang diterbitkan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	60 Persen	60 Persen	0	0			103.906.266	

3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase rekomendasi Izin Usaha Sektor Perdagangan yang Diterbitkan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	70 Persen	70 Persen	0	0				103.906.266
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	250 Izin	250 Izin	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 Persen	103.906.266
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	50 Unit	50 Unit	0	0				155.859.399
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase rekomendasi Izin Usaha Sektor Perdagangan yang Diterbitkan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	70 Unit	70 Unit	0	0				93.559.399
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	2 Unit	2 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit	51.500.000

3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase rekomendasi Izin Usaha Sektor Perdagangan yang Diterbitkan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	70 Persen	70 Persen	0	0				62.300.000
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	70 Dokumen	70 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Persen	35.300.000
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	11 Kecamatan	11 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Persen	27.000.000
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase jenis komoditi yang dipantau (%)	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	60 Persen	60 Persen	100.000.000	850.000.000				694.050.000
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan, perindustrian dan KUKM	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	13,5 Persen	13,5 Persen	0	0				253.450.000
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	11 Laporan	11 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 Persen	150.000.000
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	2.92 Persen	2.92 Persen	100.000.000	850.000.000				403.250.000

3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	150.000.000
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Laporan	1 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	103.250.000
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	800.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	150.000.000
3	30	04	2,03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	2.92 Persen	2.92 Persen	0	0				37.350.000
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Laporan	1 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70 Persen	10.500.000

3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	19 Persen	19 Persen	0	0				187.031.279
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi Izin Usaha Sektor Perdagangan yang Diterbitkan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	70 Persen	70 Persen	0	0				187.031.279
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Persen	31.200.000
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	2 Orang	2 Orang	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Persen	25.850.000
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	2 Orang	2 Orang	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Persen	51.181.279
3	30	05	2.01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	6 Orang	6 Orang	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Persen	25.850.000

3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000				436.406.317
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Tertib ukur dan alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000				436.406.317
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	400 Alat	400 Alat	25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	166.406.317
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	150 Orang	150 Orang	25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 %	206.000.000
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk lokal yang dipasarkan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	33 UMKM	33 UMKM	0	0				103.906.266
3	30	07	2,01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase rekomendasi Izin Usaha Sektor Perdagangan yang Diterbitkan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	70 UMKM	70 UMKM	0	0				103.906.266

3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	33 UMKM	71.000.000
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					4.913.922.296	4.915.382.296			9.874.539.107
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja (%)	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	70,28 Persen	70,28 Persen	4.913.922.296	4.915.382.296			6.468.600.000
3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	66,15 Persen	66,15 Persen	50.000.000	50.000.000			175.000.000
3	31	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja/RKT)	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	3 Dokumen	3 Dokumen	7.000.000	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70,28 Persen	35.000.000
3	31	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70,28 Persen	16.500.000
3	31	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA- P)	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70,28 Persen	16.500.000

3	31	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70,28 Persen	10.000.000
3	31	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70,28 Persen	10.000.000
3	31	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja (Lakip/LKPJ/LPPD, Buku Profil)	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70,28 Persen	46.000.000
3	31	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP dan Implementasi RB (Cascading, PK, IKU, IKI, Rencana Aksi, Monev PK)	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	13 Dokumen	13 Dokumen	12.000.000	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70,28 Persen	41.000.000
3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	66,15 Persen	66,15 Persen	2.958.394.296	2.958.394.396				4.374.300.000
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	39 Orang	39 Orang	2.943.394.296	2.943.394.396	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70,28 Persen	4.339.000.000

3	31	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70,28 Persen	15.300.000
3	31	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah SPJ Fungsional	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70,28 Persen	11.000.000
3	31	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan RF-K	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70,28 Persen	9.000.000
3	31	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	66,15 Persen	66,15 Persen	10.000.000	10.000.000				11.000.000
3	31	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	0 Laporan	0 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70,28 Persen	0
3	31	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70,28 Persen	11.000.000

3	31	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	0 Laporan	0 Laporan	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70,28 Persen	0
3	31	01			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	66,15 Persen	66,15 Persen	20.000.000	20.000.000			143.500.000
3	31	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (DUK,KGB, KP, KP4) yang tersusun	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70,28 Persen	15.000.000
3	31	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	3 Laporan	3 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70,28 Persen	11.000.000
3	31	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi kinerja ASN (SKP, DP3) yang tersusun	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70,28 Persen	10.000.000
3	31	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	4 ASN	4 ASN	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70,28 Persen	80.000.000
3	31	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implemetasi peraturan perundang undangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	2 ASN	2 ASN	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70,28 Persen	27.500.000

3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	66,15 Persen	66,15 Persen	624.943.800	625.911.700				672.700.000
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	70 Buah	70 Buah	161.686.000	161.686.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		70,28 Persen	200.000.000
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan (spanduk) yang tersedia	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	83 Buah	83 Buah	92.518.800	93.486.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		70,28 Persen	110.000.000
3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah tamu dinas yang terfasilitasi	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	500 Orang	500 Orang	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		70,28 Persen	8.000.000
3	31	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu dinas yang terfasilitasi	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	500 Orang	500 Orang	0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		70,28 Persen	34.700.000
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Perindag KUKM yang tersusun	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	272 Laporan	272 Lapora n	370.739.000	370.739.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		70,28 Persen	320.000.000

3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	66,15 Persen	66,15 Persen	368.828.000	352.830.000				434.000.000
3	31	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	6 Unit	6 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70,28 Persen	40.000.000
3	31	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	7 Unit	7 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70,28 Persen	145.000.000
3	31	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	7 Unit	7 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70,28 Persen	105.000.000
3	31	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan halaman yang dibangun	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	2 Unit	2 Unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70,28 Persen	118.000.000
3	31	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Unit	1 Unit	368.828.000	352.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70,28 Persen	26.000.000

3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	66,15 Persen	66,15 Persen	548.846.200	565.336.200				593.300.000
3	31	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat dinas yang terkirim	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	0 Laporan 1 tahun	0 Laporan 1 tahun	15.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen 70,28 Persen	7.500.000
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Telpon, Listrik dan Air yang tersedia	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	3 Buah	3 Buah	110.155.000	110.155.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen 70,28 Persen	86.100.000
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PHL sebagai pelayan umum Perindag KUKM	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	52 Orang	52 Orang	423.691.200	440.181.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen 70,28 Persen	499.700.000
3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LAKIP Dinas Perindag KUKM	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	66,15 Persen	66,15 Persen	332.910.000	332.910.000				64.800.000
3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Kantor yang terpelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	8 Unit 0 Unit	8 Unit 0 Unit	107.910.000	107.910.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70,28 Persen	64.800.000

3	31	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	0 Unit	0 Unit	225.000.000	225.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70,28 Persen	0
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	15 Persen	15 Persen	0	0			3.303.436.107
3	31	02	2.01		Susunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi Izin Usaha Sektor Perdagangan yang Diterbitkan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	70 Persen	70 Persen	0	0			3.303.436.107
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pembentukan Sentra IKM	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	12 Sentra	12 Sentra	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Persen	453.200.000
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Pendampingan Sentra	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	11 Sentra	11 Sentra	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Persen	300.136.107
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelatihan Pengolahan Industri dan Pemantauan Hasil Pelaksanaan Pelatihan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	16 Kali	16 Kali	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Persen	453.300.000

3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Bantuan Pengadaan Peralatan Sentra	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	11 Kecamatan	11 Kecamatan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Persen	990.000.000
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Pameran Indsutri Kreatif, Deskranasda, Hari Jadi Sulsel dan Pameran Industri	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	4 Kali	4 Kali	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Persen	503.500.000
TOTAL										6.215.952.296	7.390.952.296		13.775.065.444	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menerangkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas Program Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2023, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan.

Demikian Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 Lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang disusun sebagai salah satu bahan dalam Penyusunan Anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023. Semoga dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 ini, semua Perencanaan dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat lebih terarah untuk peningkatan kualitas pelayanannya terhadap masyarakat.